



Gapit: Jaringan Mobilisasi Suara di Pilkades

George Towar Ikkal Tawakkal¹✉

¹ Universitas Brawijaya, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima 15 Oktober 2016
Disetujui 20 Desember 2016
Dipublikasi 15 Januari 2017

Keywords:
Gapit; Vote Broker;
Mobilization; Pilkades

Abstrak

Masyarakat desa sudah mengenal demokrasi sejak masa kolonial, yakni pemilihan lurah. Instrumen demokrasi tersebut tetap dipertahankan, meskipun terjadi beberapa perubahan rezim. Saat ini, pemilihan lurah dikenal sebagai pemilihan kepala desa (Pilkades). Pilkades memiliki karakteristik yang khas dibanding pemilu lain, yakni ketiadaan partai politik. Hal tersebut memaksa calon membangun mesin politik mandiri untuk mobilisasi suara. Artikel ini akan membahas bagaimana mesin politik tersebut terbentuk, bagaimana bentuk dan cara kerja mesin politik tersebut. Pengamatan langsung dan wawancara dilakukan di Pilkades Desa Mranggen 2016. Data menunjukkan, masyarakat Mranggen menyebut mesin politik tersebut sebagai gapit. Gapit dibangun atas dasar gengsi, hubungan sosial, dan materi. Proses konsolidasi gapit mencakup dua pola, pengembangan dan penciptaan. Gapit merupakan jaringan, yang memiliki struktur tiga tingkat. Cara kerja gapit meliputi pemetaan pemilih, membangun opini, menyelenggarakan pertemuan warga, membagikan materi calon, dan memastikan pemilih telah mencoblos. Kontribusi keilmuan artikel ini adalah, mendiskusikan perluasan makna makelar suara, bukan hanya sebagai perantara dalam jual beli suara.

Abstract

Villagers have practiced democracy since colonial era. They have lurah election. Government still keep it, although national politics got some regim change. Now, it is called as Village head election (Pilkades). Pilkades has a distinctive character than other election form in Indonesia. No political party in Pilkades. That asked candidates to build political machine for mobilizing voters. This article talk about how the political machine was built, what shape of the political machine is, and how it work. I conducted observation and some interviews to peoples who involved in 2016 Mranggen Village Head Election. The result, Mranggen villagers call the political machine as gapit. Gapit was constructed by prestige, social relationship, and material. Their consolidation can be distinguished in two process, transformating and creating. Gapit is a network, which has structure with three level; coordinator gapit, RW gapit, and RT gapit. They have tasks: mapping voter, developing issue, organizing meeting, distributing goods, and monitoring presence of voters in polling station. This article will contribute to discussing about extending meaning of vote broker, not only as intermediary between candidate and voters in distributing money.

Pendahuluan

Masyarakat desa adalah komunitas politik paling bawah yang ada di Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan terdapatnya pemerintahan desa sebagai pemerintahan paling bawah dari hirarkhi pemerintahan di Indonesia. Selain memiliki pemerintahan desa, masyarakat desa juga memiliki budaya demokrasi untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam menentukan kepala pemerintahan desa.

Menurut sejarah, demokrasi desa adalah demokrasi asli yang sudah ada sebelum Indonesia terbentuk (Halili, 2009). Salah satu instrumen demokrasi desa telah hadir di masyarakat desa sejak sebelum era Indonesia, yakni pemilihan lurah, atau sekarang dikenal dengan pemilihan kepala desa (Pilkades). Masyarakat desa mengenal Pilkades ketika Thomas Stanford Raffles, gubernur jendral Indonesia 1811-1816, mengeluarkan regulasi yang merubah sistem politik masyarakat desa. Kepala desa (saat itu dikenal sebagai lurah), yang sebelumnya diangkat oleh pemerintah di atasnya, diubah menjadi dipilih oleh masyarakat desa. Tujuan penerapan regulasi tersebut adalah untuk merubah budaya lurah yang cenderung terikat pada penguasa pribumi, serta memperkenalkan model demokrasi barat (Nurkholis, 2011). Penerapan regulasi tersebut dinilai tepat, dengan dipilihnya lurah oleh warga desa, maka pengaruh raja mengalami penurunan. Model demokrasi barat tersebut merubah pola hubungan lurah. Sebelumnya, jabatan lurah

bersifat transaksional antara calon lurah dengan raja. Setelah regulasi diterapkan, pola hubungan berubah menjadi hubungan antara calon lurah dengan warga desa.

Demokrasi desa dalam bentuk pemilihan kepala pemerintahan desa terus diterapkan hingga masa Indonesia, melalui rezim orde lama, orde baru, hingga saat ini. Perjalanan panjang demokrasi tersebut juga menempatkan pemilihan kepala desa sebagai pemilu dengan karakteristik yang berbeda dibanding pemilu lain. Perbedaan itu terwujud pada pelaksanaan Pilkades yang memiliki format berbeda dengan pemilu-pemilu lain. Pilkades tidak melibatkan partai secara formal, berbeda dengan Pilkada Pilgub ataupun Pilpres yang mensyaratkan dukungan partai. Bisa saja secara informal partai menyediakan mesin partai untuk mendukung salah satu calon, namun itu tidak lazim di Pilkades. Apalagi partai tidak memiliki mesin mobilisasi yang dapat diandalkan (Tawakkal, 2009), khususnya pada level grassroot. Terlepas dari lemahnya mesin partai, konsekuensi dari perbedaan format tersebut adalah, calon kepala desa tidak memiliki mesin politik yang siap digunakan untuk mobilisasi pemilih. Calon kepala desa dihadapkan pada kenyataan harus membangun sendiri mesin politiknya. Calon kepala desa harus bisa memanfaatkan unsur-unsur yang ada di masyarakat desa untuk membangun mesin politik yang kuat, yang mampu melakukan mobilisasi pemilih. Tidak jarang,

pertarungan mesin politik lebih menentukan kemenangan daripada figur calon kepala desa.

Artikel ini membahas bagaimana mesin politik tersebut terbentuk, bagaimana bentuk mesin politik tersebut, dan bagaimana mesin politik tersebut bekerja. Penelitian telah dilakukan di Pilkades Desa Mranggen 2016, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Informasi diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap mesin politik, dan wawancara kepada orang-orang yang terlibat langsung di dalam mesin politik tersebut.

Dalam literatur kepemiluan terdapat beberapa konsep mesin politik tentang orang-orang non struktural partai yang melakukan mobilisasi pemilih, di antaranya adalah konsep relawan dan konsep makelar suara. Fisher, dkk. (2014) menggambarkan relawan sebagai orang non struktural yang mengkampanyekan kandidat secara sukarela, sebagai bagian dari perjuangan idealisme. Relawan seringkali berasal dari anggota partai di luar struktural. Sedangkan makelar suara digambarkan sebagai orang non partai yang menghubungkan calon dengan pemilih, dalam kerangka jual beli suara (Hellmann, 2014; Aspinall, 2014; Finan dan Schechter, 2012; Blaydes, 2006). Dari definisi tersebut, terdapat perbedaan utama bahwa relawan berlatar belakang suasana idealisme, sedangkan makelar suara berlatar belakang suasana transaksional. Dalam konteks mesin politik di Pilkades, konsep makelar suara lebih tepat untuk menggambarkan bagaimana

suasana transaksional menjadi bagian yang mengiringi keberadaan mesin politik tersebut.

Kajian-kajian tentang makelar suara telah banyak dilakukan di berbagai negara. Fenomena transaksional antara kandidat dan makelar suara setidaknya ditunjukkan oleh Hellmann (2014) dan Aspinall (2014). Hellmann (2014) menggambarkan, penyediaan dana publik melalui program pemerintah kepada para makelar suara setelah membantu kemenangan calon, menjadi latar belakang terbentuknya hubungan permakelaran di Jepang. Kemudahan usaha, proyek pemerintah, dan jaminan keamanan bisnis ilegal, menjadi latar belakang permakelaran di Taiwan. Di Indonesia, permakelaran suara dapat dilatar belakangi oleh keuntungan materi yang akan didapat oleh makelar suara atas jasa nya (Aspinall, 2014). Mengenai bentuk makelar suara, jaringan adalah bentuk yang lazim digambarkan dalam kajian makelar suara (Hellmann, 2014; Aspinall, 2014; Finan dan Schechter, 2012; Blaydes, 2006; Mattlin, 2004). Jaringan tersebut merujuk pada praktek makelar suara yang melibatkan beberapa orang. Struktur yang disebutkan Aspinall dan Sukmajati (2015) sebagai struktur tim sukses, memiliki bentuk seperti piramida. Pada tingkat tertinggi, terdapat Tim relawan, kemudian di bawahnya terdapat Koordinator kecamatan. Di bawah koordinator kecamatan terdapat koordinator desa. Di bawah koordinator desa terdapat koordinator lapangan. Di bawah koordinator terdapat

relawan. Hellmann (2014: 283) menjelaskan keberadaan Hua Khanaen di Thailand sebagai jaringan makelar suara yang digerakkan oleh orang-orang yang memiliki pengaruh di komunitasnya. Hellmann (2014: 282-283), kemudian juga menjelaskan jaringan Tiau-aka di Taiwan. Partai memanfaatkan interpersonal network yang terdapat pada hubungan pertemanan, tetangga, dan lain sebagainya, untuk membentuk jaringan makelar suara. Mengenai bagaimana cara kerja makelar suara, terdapat beberapa perbedaan. Larreguy (2016) memosisikan makelar suara sebagai pihak yang memetakan suara pemilih, yang akan digunakan untuk jual beli suara di Mexico. Blaydes (2006) memosisikan makelar suara sebagai pihak yang mengontrol komitmen pemilih dalam jual beli suara di Mesir. Finan dan Schechter (2012) menggambarkan kemungkinan makelar suara bertindak sebagai penguat nilai balas budi pada pemilih atas materi yang telah diterima pemilih di Paraguay.

Kajian Pustaka

Gapit, Makelar Suara di Pilkades

Keberadaan orang non partai yang membantu calon untuk mobilisasi pemilih, dalam suasana transaksional, ditemukan di Pilkades Desa Mranggen. Masyarakat Mranggen secara tradisional menyebutnya sebagai Gapit. Merujuk pada kajian literatur di atas yang menyebutkan bahwa makelar suara memanfaatkan jaringan sosial yang sudah ada, gapit juga memiliki karakteristik

tersebut. Gapit adalah orang yang menyediakan jaringan sosial yang dimilikinya untuk membantu perolehan suara bagi kandidat. Kata “Gapit” berasal dari bahasa jawa, yang memiliki beberapa arti dasar: sesuatu yang digunakan untuk menjepit (Winter, 1928), apit (Padmasusastra, 1903: 1014), atau benda pada wayang yang dipakai untuk memegang (Poerwadarminta, 1939: 132). Gapit juga dapat merujuk pada senjata tajam, sebagaimana terdapat pada naskah Tatacara (Padmasusastra, 2602 : 84)¹. Bahasa jawa juga mengenal kalimat “Baladewa ilang gapite”, yang memiliki makna Baladewa hilang kekuasaannya/ kesaktiannya (Padmasukaca, 1967: 9). Bila kita melihat arti gapit sebelumnya, maka dapat difahami bahwa “kekuasaan/kesaktian” itu diasumsikan dengan senjata. Dari berbagai makna tersebut dapat ditarik arti, gapit adalah benda untuk menjepit. Penggunaan kata Gapit pada konteks kepemiluan adalah sebagai orang. Merujuk pada arti asal kata “gapit”, maka dapat dimaknai bahwa gapit adalah orang yang digunakan untuk “menjepit” orang-orang (pemilih).²

Fenomena transaksional dan keberadaan Gapit di Pilkades 2016, sebenarnya bukan hal yang baru di masyarakat Mranggen. Peneliti tidak berhasil

¹ Tahun yang tertera pada perpustakaan digital adalah 2602. Pihak pengelola memberikan tanda (? AD) yang dapat difahami bahwa pihak pengelola tidak dapat memahami angka yang tertera di naskah.

² Cara penarikan arti sebagaimana di atas juga disampaikan oleh informan.

menelusuri sejak tahun kapan kata “gapit” digunakan, namun berdasar beberapa informan, mereka memiliki keyakinan sama bahwa kata “gapit” sudah lama digunakan di Pilkades. Bila menelusuri kapan pertama kali masyarakat desa mengenal Pilkades, kita dapat merujuk pada Nurcholis (2011) yang menyatakan bahwa demokrasi prosedural sudah diperkenalkan oleh bangsa barat sejak dua ratus tahun lalu ketika Indonesia dikuasai oleh Inggris pada tahun 1811-1816. Pernyataan informan bahwa gapit muncul sudah lama, serta fakta literatur yang menyatakan bahwa Pilkades sudah ada sejak lebih dari dua ratus tahun yang lalu, maka dapat disimpulkan bahwa kemungkinan gapit sudah berusia tua di dalam demokrasi desa.

Temuan dan Diskusi

Gengsi, Wonge Dewe, dan Materi di Seputar Pergapitan

Motivasi seseorang untuk menjadi gapit dapat berbentuk berbagai macam. Pada Pilkades Desa Mranggen 2016, motivasi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yakni gengsi, janji, dan materi. Gengsi merujuk pada aktualisasi harga diri atau status sosial tertentu yang melatar belakangi keterlibatan seseorang menjadi gapit. Bagi sebagian gapit, Pilkades Desa Demak 2016 dapat dimaknai sebagai kelanjutan dari Pilkada Demak 2015. Alasan yang mendukung argumen tersebut adalah, keberadaan jaringan tertentu di Pilkada Demak 2015 yang juga hadir di Pilkades

Demak 2016. Jaringan tersebut tidak berhasil memenangkan calon bupati pada Pilkada Demak 2015. Sebagai jaringan yang dipimpin oleh elit sosial yang memiliki reputasi tinggi secara sosial, kekalahan di Pilkada Demak 2015 menjadi pukulan sosial bagi pimpinan jaringan tersebut. Untuk mengembalikan reputasi, Pilkades Desa Mranggen 2016 adalah kontestasi terdekat setelah Pilkada Demak 2015 yang dijadikan arena pengembalian reputasi. Pimpinan jaringan tersebut mendorong seseorang untuk menjadi calon, dan bahkan menyediakan dana dan jaringan untuk memenangkan calon tersebut. Hasil menunjukkan kemenangan calon tersebut. Dana dan gapit dari pimpinan jaringan tersebut menjadi faktor penentu kemenangan secara telak.

Pertaruhan gengsi juga tercermin pada calon lawan. Keberadaan calon yang berasal dari organisasi keagamaan terbesar di Mranggen, menjadi motivasi beberapa gapit untuk memenangkannya. Latar belakang pergerakan gapit tersebut mencerminkan ketidakrelaan bila Mranggen dipimpin oleh kepala desa yang berasal dari organisasi keagamaan minoritas. Beberapa tokoh agama dari ormas terbesar bahkan menandatangani selebaran yang menghimbau warga ormas tersebut untuk memilih calon yang berlatar belakang ormas yang sama. Lemahnya pendanaan dan jaringan gapit, menjadi latar belakang kekalahan calon tersebut dari calon lawan yang berasal dari ormas minoritas.

Selain gengsi, per-gapit-an juga dilatar-belakangi wongse dewe. Wongse dewe merujuk pada kedekatan hubungan antara calon dan gapit yang melatar belakangi keterlibatan seseorang menjadi gapit. Kedekatan hubungan tersebut dapat berupa hubungan saudara, hubungan kerja, maupun hubungan pertemanan. Kandidat memanfaatkan seluruh anggota keluarga untuk membantu mobilisasi suara. Sebagaimana lazimnya, desa adalah komunitas masyarakat rural dimana satu dan lainnya masih memiliki kemungkinan besar sebagai keluarga. Saudara, bagi orang desa dimaknai lebih luas, bukan hanya individu-individu sekandung dan turunannya, namun juga individu-individu turunan kakek bahkan kakek buyut. Seperti contoh, Jami'an adalah suami dari anak sepupu calon, yang secara aktif menjadi gapit di salah satu RT.

Hubungan kerja juga mendasari keterlibatan seseorang untuk menjadi gapit. Salah satu bentuk hubungan kerja adalah antara orang tersebut dengan calon, Salah satu calon memiliki rumah tangga yang mempekerjakan beberapa orang. Calon tersebut menggerakkan para pekerjanya untuk menjadi gapit. Seperti contoh, Sumini adalah pembantu rumah tangga di rumah calon, yang menjadi gapit untuk menysasar tetangga dan anggota keluarga Sumini. Bentuk hubungan kerja lain dapat berupa hubungan kerja orang tersebut dengan gapit lain. Gapit menyediakan pekerjanya untuk ikut terlibat menjadi gapit. Seperti contoh, Darwan sehari-hari bekerja

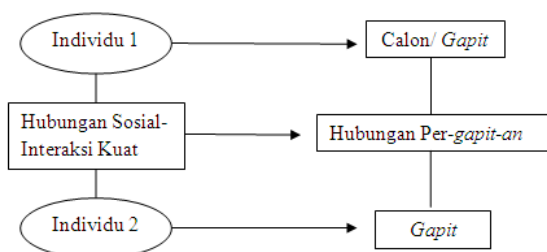
untuk pimpinan jaringan gapit. Darwan menjadi gapit atas permintaan majikan nya. Hubungan pertemanan menjadi bentuk hubungan yang lebih banyak dijumpai. Pertemanan antara calon dengan gapit, maupun antara gapit dengan gapit lain. Seperti contoh, salah satu calon berprofesi sebagai guru. Calon tersebut memanfaatkan guru-guru lain untuk membantu mobilisasi suara. Pertemanan antar gapit juga lazim dijumpai pada gapit di tingkat RT.

Kekosongan motivasi yang tidak dapat dijelaskan dengan gengsi maupun wongse dewe, dapat dijelaskan dengan latar belakang materi. Materi menjadi jembatan bagi orang-orang yang berada di luar gengsi dan wongse dewe. Hubungan mereka menjadi sangat transaksional. Beberapa orang bersedia terlibat menjadi gapit dikarenakan keuntungan materi yang akan didapatkan. Mereka mendapatkan upah atas jasa mereka membantu mobilisasi pemilih. Bahkan, materi menjadi alasan yang paling umum digunakan untuk menarik seseorang agar bersedia menjadi gapit.

Bagaimana berbagai latar belakang tersebut membentuk dirinya menjadi organisasi gapit? Proses pembentukan dimaksudkan sebagai proses dari keadaan sebelum jaringan gapit hingga kemudian menjadi hubungan antar gapit dalam organisasi gapit. Terdapat dua karakteristik pola pembentukan, yakni pengembangan dan penciptaan. Pengembangan merujuk pada proses terbentuknya organisasi gapit yang

didasarkan pada jaringan sosial lain yang sudah mapan. Jaringan sosial yang sudah mapan ditandai dengan interaksi antar individu yang sering di dalam kehidupan sehari-hari. Jaringan tersebut kemudian merubah komunikasi menjadi jaringan gapit. Pola seperti ini memungkinkan terjadi, karena di masyarakat desa terdapat elit sosial yang memiliki interaksi kuat dengan follower nya dalam keseharian. Seperti contoh jaringan gapit yang berasal dari ormas keagamaan. Mereka secara rutin memiliki forum keagamaan. Dalam konteks relasi antar individu, wongge dewe yang berlatar belakang persaudaraan, kerja, maupun pertemanan, mentransformasikan dirinya menjadi relasi per-gapit-an.

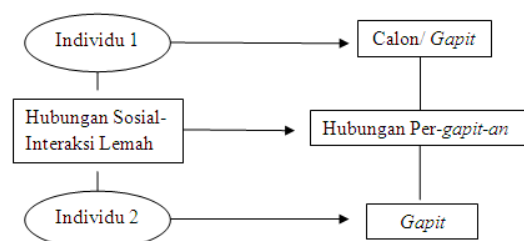
Bagan 1. Pengembangan



Karakteristik proses lainnya adalah penciptaan. Penciptaan adalah proses pembentukan organisasi gapit yang tidak didasari interaksi yang sering di antara mereka dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun antar gapit telah mengenal sebelumnya, namun mereka memiliki interaksi yang lemah secara sosial. Hubungan tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan interaksi secara tiba-tiba. Hubungan sosial dan inetraksi tersebut ditujukan untuk kepentingan Pilkades. Pola penciptaan biasanya ditemukan pada gapit

yang secara sosial bukan wongge dewe. Alasan yang lazim melatarbelakangi adalah bersifat transaksional.

Bagan 2. Penciptaan



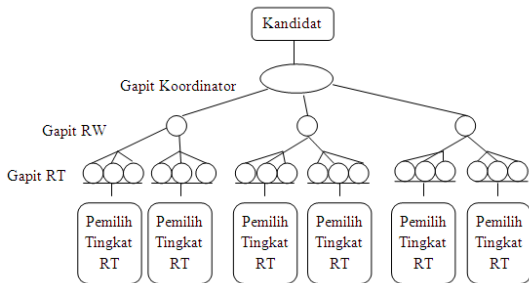
Struktur Jaringan Gapit

Pola jaringan gapit berbentuk jaringan multi-level, yakni jaringan gapit yang terstruktur secara bertingkat. Jaringan gapit ini terdiri lebih dari satu individu. Pada Pilkades Desa Mranggen 2016, jaringan tersebut terdiri dari tiga tingkat, yakni gapit koordinator, gapit RW, dan Gapit RT. Gapit koordinator adalah orang yang menjadi puncak struktur gapit. Gapit koordinator membawahi seluruh gapit yang ada di desa Mranggen untuk calon tertentu. Gapit RW adalah gapit yang memiliki wilayah kerja di rukun warga (RW), yang membawahi gapit-gapit tingkat RT. Gapit RT adalah gapit terbawah, yang memiliki wilayah kerja di rukun tetangga (RT). Gapit RT berinteraksi langsung dengan pemilih.

Tugas pokok masing-masing tingkatan gapit adalah berbeda-beda. Koordinator bertugas merekrut gapit RW. Koordinator juga sekaligus menjadi manajer atas per-gapit-an. Setelah gapit RW terbentuk, maka tugas gapit RW adalah merekrut gapit RT. Jaringan gapit yang sudah terbentuk ini

kemudian dilaporkan kepada calon oleh koordinator. Selanjutnya, koordinator menyerahkan daftar gapit kepada calon.

Bagan 4. Struktur Gapit



Hirarki dalam struktur gapit mencerminkan wilayah administratif yang ada di lingkup desa. Desa Mranggen terdiri dari sembilan (9) Rukun Warga (RW), dan total delapan puluh (80) Rukun Tetangga (RT) di bawah RW. Gapit koordinator biasanya dipegang oleh satu orang. Pada tingkat RW, setidaknya satu gapit. Sedangkan pada tingkat RT, jumlahnya berbeda-beda, antara satu hingga tiga gapit. Setiap calon memiliki komposisi gapit yang berbeda. Terdapat calon dengan jaringan gapit lengkap hingga tingkat RT, namun juga terdapat calon yang tidak memiliki gapit lengkap. Komposisi juga mencerminkan kekuatan gapit yang dimiliki calon.

Selain sebagai alur instruksi kerja, pada konteks jual beli suara, struktur hirarki tersebut juga menjadi alur materi dari calon kepada pemilih. Koordinator adalah gapit pertama yang memegang amplop berisi uang untuk pemilih. Koordinator menyerahkan amplop kepada gapit RW, dan kemudian diteruskan kepada gapit RT. Meskipun interaksi dan komunikasi terjadi antara calon

dan seluruh gapit dari berbagai tingkatan melalui forum-forum yang diadakan di rumah calon, namun untuk distribusi uang tetap mengikuti struktur organisasi gapit.

Hal menarik dari struktur gapit adalah, mereka tidak dibedakan berdasar latar belakang gapit. Seperti contoh, di RT 6 RW 2, terdapat tiga gapit yang bekerja untuk satu calon. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, yakni hubungan saudara dan hubungan kerja dengan calon. Mereka saling berkoordinasi sebagai satu tim gapit di RT tersebut. Dalam hal distribusi uang, meskipun seorang gapit RT memiliki hubungan saudara dengan calon, gapit tersebut tidak menerima uang langsung dari calon. Gapit tersebut tetap menerima uang sesuai alur dalam struktur gapit.

Cara Kerja Gapit

Poin penting per-gapit-an adalah mobilisasi pemilih. Segala tindakan yang dilakukan oleh gapit, seharusnya bertujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon yang menggunakan jasa gapit tersebut. Untuk mencapai dan memaksimalkan tujuan tersebut, gapit melakukan beberapa metode. **Pertama**, adalah memetakan pemilih. Pada salah satu jaringan gapit, gapit harus melaporkan peta pemilih di wilayahnya. Seberapa besar pemilih yang berpotensi memilih calon tertentu, dan peluang-peluang penggunaan teknik tertentu, menjadi poin penting dari pemetaan ini. Gapit biasanya diharuskan memiliki data pemilih yang

bersedia memilih calon tersebut. Beberapa teknik yang bisa digunakan adalah, mewawancarai pemilih tentang kesediaan memilih calon tertentu, dan memperkirakan potensi suara dari perbincangan-perbincangan sosial di wilayah tersebut.

Dengan kedua teknik tersebut, gapit dapat memiliki data akurat tentang pemilih yang berpotensi dipengaruhi, dan pemilih yang tidak bisa dipengaruhi. Pemilih yang tidak bisa dipengaruhi, biasanya dapat diketahui dengan menelusuri latar belakang kedekatan emosional pemilih dengan calon lawan, seperti contoh memiliki hubungan persaudaraan dengan calon lawan. Selain menelusuri latar belakang, tidak jarang pemilih yang mengungkapkan secara langsung kepada gapit bahwa dirinya tidak bisa memilih calon tertentu. Pada kondisi umum, pemilih yang tidak memiliki kedekatan emosional dengan calon, lebih sulit dipetakan bila berdasar pernyataan. Kebiasaan unik masyarakat desa, cenderung menyembunyikan sesuatu yang tidak disukai. Seperti contoh, pemilih sudah memiliki pilihan calon tertentu. Ketika gapit datang ke rumah untuk mewawancarai tentang kesediaannya memilih calon lain, pemilih tersebut sungkan untuk berkata jujur bahwa dirinya sudah punya pilihan. Mewawancarai dan menelusuri lewat perbincangan sehari-hari, menjadi teknik yang ampuh untuk memetakan pemilih.

Pemetaan peluang teknik tertentu untuk memaksimalkan mobilisasi suara,

membutuhkan kerja keras gapit. Kecerdasan gapit menganalisa situasi sosial di wilayah tertentu, menjadi kunci untuk menentukan teknik apa yang akan digunakan di wilayah tersebut. Mengingat bahwa peran ini melekat pada gapit RT sebagai gapit terbawah yang berinteraksi langsung dengan pemilih, maka kualitas gapit RT menjadi pertarungan efektifitas teknik mobilisasi suara.

Kendala yang sering dialami oleh calon adalah lemahnya kemampuan gapit untuk memetakan pemilih. Kendala tersebut biasanya disebabkan dua hal, malas dan kurang interaktif. Keharusan mewawancarai pemilih untuk mendapatkan data valid, memaksa gapit untuk meluangkan waktu. Gapit harus mendatangi setiap pemilih untuk memastikan kesediaannya memilih calon tertentu. Pada dasarnya, gapit tidak memiliki hambatan berarti untuk melakukan wawancara. Regulasi anti politik uang dan benturan dengan gapit calon lawan, tidak menjadi kendala berarti. Sebagai catatan, bila pun wawancara akan berujung pada jual beli suara, pada kenyataannya pemilih permisif terhadap fenomena tersebut. Bahkan beberapa pemilih menyatakan menantikan didatangi gapit, dan menantikan pemberian uang dari calon.

Gapit yang malas, diperparah dengan dengan minimnya tingkat interaksi antara gapit dengan masyarakat di wilayahnya. Pada kasus tertentu, gapit secara sosial memang tidak pernah berbaur dengan masyarakat. Calon bukan tidak mengetahui kualitas

interaksi gapit, namun calon tidak memiliki pilihan lain. Keterbatasan jaringan sosial yang dimiliki calon menyebabkan keterbatasan pilihan orang-orang yang dijadikan gapit. Malas dan lemahnya interaksi dengan pemilih, menyebabkan gapit melakukan rekayasa pemetaan pemilih. Data yang disampaikan kepada calon menjadi tidak objektif, karena tidak didasari pengumpulan data yang memadai.

Mekanisme kontrol yang bisa dilakukan oleh kandidat terhadap pemetaan pemilih adalah melalui daftar pemilih tetap yang disediakan oleh penyelenggara Pilkadaes. Namun, mekanisme ini hanya mampu memberikan perkiraan jumlah suara yang bisa diperoleh. Dari daftar pemilih tetap, calon mengetahui jumlah pemilih di wilayah tertentu. Maka kemudian calon bisa mencocokkan bila ada penyimpangan data pemilih yang dilaporkan oleh gapit. Itu pun hanya pada bila terjadi penggelembungan data pemilih oleh gapit, yang berarti lebih besar dari jumlah pemilih yang tertera di daftar pemilih tetap. Sedangkan mengenai teknik terbaik yang bisa digunakan untuk mobilisasi suara, calon tidak memiliki mekanisme yang baik untuk memverifikasi.

Kedua, adalah membangun opini di masyarakat. Gapit harus secara aktif berinteraksi dengan masyarakat di wilayahnya. Selain untuk memetakan pemilih sebagaimana di atas, interaksi dengan pemilih diperlukan untuk memetakan dan memasukkan isu yang menguntungkan bagi

calon tertentu. Pola interaksi yang khas masyarakat desa, dimana antar individu memiliki interaksi yang tinggi, menguntungkan calon untuk menyebarkan isu dengan mudah dan cepat dibanding menggunakan media seperti brosur. Masyarakat lebih mudah menerima isu yang diterima dari mulut ke mulut, dari pada isu yang disebar melalui poster, brosur, radio, atau lainnya.

Setidaknya terdapat beberapa isu di seputar Pilkadaes Desa Mranggen 2016, yakni isu organisasi keagamaan, isu latar belakang profesi calon, dan isu kedekatan sosial. Isu organisasi keagamaan merujuk pada adanya calon yang menganggap dirinya berasal dan mewakili organisasi keagamaan terbesar di Desa Mranggen. Sedangkan terdapat calon lawan yang berlatar belakang organisasi keagamaan minoritas di Desa Mranggen. Pemanfaatan isu organisasi keagamaan paling agresif dilakukan dengan menyebarkan pamflet yang berisi himbuan agar memilih calon berlatar belakang organisasi keagamaan yang sama. Bahkan di situ tertera tanda tangan yang mengatas-namakan beberapa tokoh agama di Desa Mranggen. Isu yang melingkupinya adalah bila calon dari organisasi keagamaan minoritas berhasil menjadi kepala desa, maka akan mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan perkembangan organisasi tersebut, dan tentu dapat mengancam eksistensi organisasi mayoritas.

Pertarungan pada isu organisasi keagamaan ini semakin ramai ketika calon berlatar belakang organisasi keagamaan minoritas melakukan perlawanan. Calon tersebut melakukan beberapa safari politik dengan mendatangi rumah tokoh agama organisasi mayoritas, dan menjelaskan kampanye negatif yang menyerang dirinya, dengan mengatakan bahwa tidak akan ada kebijakan diskriminasi. Bahkan, isu yang berkembang, tokoh agama penanda tangan mendatangi rumah calon tersebut, meminta maaf dan menjelaskan kenapa ada tanda tangan di pamflet tersebut. Tekanan politik dari internal organisasi memaksa tokoh tersebut mengikuti arus organisasi, meskipun antara tokoh tersebut dan calon yang diserang, memiliki hubungan pertemanan.

Profesi guru, masih menjadi isu menarik di Pilkades Desa Mranggen 2016. Bagi sebagian masyarakat Mranggen, profesi guru masih dihormati sebagai profesi mulia. Calon yang berprofesi sebagai guru, memanfaatkan posisi sosial nya untuk menarik pemilih. Bahkan, dalam spanduk kampanye yang terpasang di lokasi strategis, calon tersebut menyebut gelar guru sebelum nama lengkapnya. Calon tersebut sebenarnya mengajar di sekolah tingkat menengah pertama, dimana siswa nya belum memiliki hak pilih. Namun, puluhan tahun durasi pengabdian sebagai guru, dapat mempengaruhi para pemilih yang dulu pernah merasakan pendidikan dari calon tersebut. Isu

profesi guru ini, hampir tidak mendapat perlawanan dari calon lain.

Isu lain, terkait dengan kedekatan sosial calon dengan masyarakat. Beberapa calon dikenal memiliki interaksi yang kecil dengan masyarakat Mranggen dalam kehidupan sehari-hari sebelum Pilkades. Sementara terdapat calon yang aktif berinteraksi dan terlibat dalam kegiatan masyarakat. Interaksi yang aktif tercermin dari intensitas calon mengikuti forum-forum informal, seperti jagongan. Bukti interaksi tersebut adalah tingkat pengenalan yang tinggi di masyarakat Mranggen, dibandingkan calon-calon lain. Secara politik, calon tersebut memiliki tingkat popularitas paling tinggi. Calon tersebut memahami kekuatan popularitas nya. Isu yang kemudian digulirkan adalah, “calon harus merakyat”. Kalimat tersebut merujuk pada bahwa kepala desa harus berasal dari orang yang sering kumpul dengan warga, sering terlibat dalam kegiatan warga, dan dikenal oleh warga. Isu ini dihindari oleh calon lain yang memiliki tingkat interaksi rendah dengan warga.

Ketiga, gapit memainkan peran sebagai organizer pertemuan warga. Gapit mengatur, menyiapkan, bahkan menyediakan tempat untuk acara pertemuan warga. Kegiatan diselenggarakan di tingkat RT. Pertemuan tersebut memiliki dua tujuan, yakni memperkenalkan calon, dan memperkenalkan gapit. Profil calon akan dijelaskan kepada pemilih yang hadir. Beberapa pertemuan tidak dihadiri oleh calon,

namun jumlahnya kecil. Calon berusaha menghadiri setiap pertemuan yang diselenggarakan. Kehadiran calon di pertemuan tersebut bukan hanya sebagai perkenalan, namun bagi warga juga dianggap sebagai kehormatan. Kehadiran calon dimaknai bahwa calon menghormati warga wilayah tersebut. Ketidakhadiran calon dapat dimaknai oleh pemilih bahwa calon menyepelekan warga wilayah tersebut. Sekali calon tidak hadir, calon lain akan memanfaatkan ketidakhadirannya untuk menggulirkan isu diskriminasi. Isu tersebut dapat dibendung dengan memberikan alasan yang kuat dan mendatangi warga di kesempatan lain.

Seluruh gapit RT akan hadir di pertemuan warga. Warga akan mengetahui bahwa orang-orang ini adalah gapit untuk calon tertentu. Tujuan pengenalan ini meliputi beberapa hal. Pengenalan dapat memberikan rujukan bagi pemilih yang membutuhkan rujukan untuk memutuskan pilihan. Beberapa pemilih mengakui, melihat calon dari siapa gapit yang bekerja untuknya. Bila gapit memiliki latar belakang sosial yang baik, maka pemilih menganggap bahwa calon yang didukungnya memiliki latar belakang sosial yang baik pula. Rujukan juga berupa solidaritas, ketika pemilih mengikuti gapit karena merasa memiliki hubungan dekat dengan gapit. Namun, lebih banyak pemilih lain tidak memperdulikan siapa gapitnya. Pengenalan juga ditujukan untuk mengontrol kinerja gapit secara sosial, khususnya bila

kemudian terdapat uang atau materi dari kandidat. Pemilih memiliki kesadaran yang tinggi terhadap distribusi materi dari calon. Artinya, pemilih memang menyadari, bahkan berharap, akan ada distribusi uang. Ketika pemilih tidak menerima uang, pemilih akan menanyakan kepada gapit di wilayahnya. Pemilih dengan cepat akan memperoleh informasi tentang apakah calon mendistribusikan uang atau tidak. Bila calon mendistribusikan, namun gapit tidak membagikan, maka warga akan mudah untuk mengetahui ketidakjujuran gapit.

Bagi pemilih, keuntungan langsung yang didapat dengan menghadiri pertemuan adalah memperoleh keuntungan materi. Beberapa pertemuan memberikan uang saku untuk warga yang hadir. Sedangkan beberapa pertemuan lain tidak memberikan uang saku, namun memberikan roti atau makanan untuk dibawa pulang. Tanpa keuntungan langsung yang bisa didapat, warga sulit untuk bersedia menghadiri pertemuan tersebut. Bagi gapit yang jeli, peta pemilih dapat dibaca dari kehadiran warga di pertemuan. Meskipun mayoritas warga akan hadir di setiap pertemuan yang diadakan setiap calon, namun ketidakhadiran pemilih dapat memberi informasi penting tentang sikap politik pemilih tersebut.

Keempat, gapit membagikan uang atau materi calon kepada pemilih. Sebelum membahas lebih detail tentang distribusi uang, perlu dipertegas bahwa uang tidak selalu benar benar berasal dari uang kandidat. Pada

salah satu calon, uang disediakan oleh pimpinan gapit. Penggunaan kalimat “uang calon” pada artikel ini tidak dimaksudkan untuk merujuk pada uang milik calon, namun dimaksudkan untuk merujuk pada uang untuk memilih calon tertentu. Terlepas dari sumber uang, gapit bertugas membagikan uang tersebut kepada pemilih. Pada kasus dengan jumlah gapit RT lebih dari satu gapit di satu RT, biasanya pembagian uang dilakukan oleh salah satu gapit RT. Namun, sedikit kasus dilakukan pembagian kerja berdasar jumlah rumah tangga pemilih.

Gapit RT menerima uang sejumlah pemilih yang dilaporkan dalam data pemilih hasil pemetaan pemilih. Uang tersebut sudah dimasukkan di amplop. Artinya, gapit RT menerima dalam bentuk amplop, dan tidak bersentuhan dengan uang tersebut. Gapit RT memperoleh sejumlah uang tersebut dari gapit RW. Sedangkan gapit RW memperoleh uang tersebut dari gapit koordinator. Gapit koordinator memperoleh uang dari pimpinan gapit maupun dari calon. Proses pembungkusan uang ke dalam amplop dilakukan oleh penyedia dana.

Keterlibatan gapit dalam pembagian uang, seringkali dilihat oleh pemilih sebagai fungsi pokok gapit. Berbicara gapit, pemilih akan berasumsi tentang distribusi uang. Kelaziman distribusi uang di Pilkades, menyebabkan politik uang adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dari sini, peran gapit menjadi sangat penting. Kejujuran dan ketepatan adalah faktor internal gapit yang

paling menentukan dalam distribusi uang. Arti penting kejujuran terdapat pada jumlah amplop yang seharusnya diterima oleh pemilih. Ketepatan dimaksudkan pada dua hal, yakni ketepatan pemilih yang diberikan uang, dan ketepatan waktu pembagian uang. Secara literatur, fungsi ini menguatkan gapit sebagai makelar suara, yang kehadirannya selalu disandingkan dengan distribusi materi dalam konteks jual beli suara.

Kelima, gapit memastikan pemilih datang dan mencoblos. Gapit harus memonitor pergerakan pemilih di wilayahnya, apakah sudah memilih atukah belum. Terdapat beberapa teknik yang dilakukan gapit untuk melaksanakan fungsi ini, yakni mendatangi rumah pemilih, menginformasikan lokasi tempat pemungutan suara (TPS), dan menyediakan transportasi menuju TPS. Gapit mengawasi pergerakan pemilih dengan tetap berada di wilayah RT. Ketika gapit memperoleh informasi bahwa pemilih belum mencoblos, gapit akan membuka komunikasi dengan pemilih tersebut. Biasanya dengan mendatangi rumah pemilih. Gapit memberikan pertanyaan perihal kenapa belum mencoblos, dan menghimbau agar segera mencoblos. Tentu, himbauan itu mengarahkan pemilih untuk memilih calon dari gapit tersebut.

Setelah gapit mendapatkan penjelasan dari pemilih, gapit akan menindaklanjutinya sesuai kebutuhan pemilih. Pada Pilkades Desa Mranggen, TPS terpusat pada satu lokasi untuk seluruh pemilih. Anehnya, lokasi

tersebut jauh dari pusat keramaian desa, dan infrastruktur jalan tidak baik. Banyak pemilih yang tidak mengetahui arah TPS. Pada situasi ini, gapit memberikan informasi mengenai rute menuju TPS. Bagi pemilih yang tidak memiliki atau kesulitan transportasi, beberapa kasus gapit menunjukkan bahwa gapit menyediakan transportasi menuju TPS. Pemilih akan dikumpulkan, dan akan diantar ke TPS. Setelah mencoblos, pemilih diantar pulang kembali. Teknik antar-jemput ini dianggap jitu untuk menjaga dan menguatkan suara pemilih. Selama perjalanan menuju TPS, gapit akan memberikan masukan kepada pemilih agar mencoblos calon tertentu. Kerja keras gapit demikian, dihargai pemilih dengan mencoblos calon tersebut.

Kesimpulan

Masyarakat Mranggen mengenal mesin politik sebagai gapit. Gapit dibentuk secara mandiri untuk mobilisasi pemilih. Tiga latar belakang kenapa seseorang bersedia menjadi gapit adalah, gengsi, wonge dewe, dan materi. Gengsi dapat berupa kebanggaan sosial yang akan didapat oleh gapit ketika calon yang didukungnya menang. Gengsi juga dapat berbentuk solidaritas organisasi, ketika isu mengarah pada persaingan kelompok. Wonge dewe adalah, merujuk pada istilah lokal yang ditujukan pada orang-orang yang sudah memiliki kedekatan emosional antar masing-masing. Wonge dewe ini dapat terwujud pada hubungan persaudaraan, hubungan kerja, dan hubungan pertemanan.

Latar belakang materi biasa muncul ketika keterlibatan seseorang didasarkan pada keuntungan materi yang didapat.

Ketiga latar belakang tersebut terkonsolidasi melalui pola pengembangan dan penciptaan, menjadi satu jaringan gapit yang memiliki struktur tiga tingkat. Gapit koordinator adalah gapit teratas. Gapit RW berada di tingkat RW, sedangkan gapit RT berhadapan langsung dengan pemilih di tingkat RT. Gapit koordinator berjumlah satu orang, yang membawahi gapit seluruh desa,. Gapit RW lazimnya berjumlah satu orang di setiap RW. Sedangkan gapit RT, dapat berjumlah satu hingga tiga orang. Struktur tiga tingkat ini juga menjadi alur informasi dan materi yang dibagikan kepada pemilih.

Gapit melakukan mobilisasi pemilih dengan melakukan lima teknik, yakni memetakan pemilih, membangun opini, mengadakan pertemuan warga, membagikan materi, dan memastikan pemilih telah mencoblos. Pemetaan pemilih dilakukan dengan mewawancarai pemilih dan menganalisa perbincangan masyarakat, dengan tujuan mengetahui potensi pemilih dan penentuan strategi mobilisasi. Pembangunan opini dilakukan dengan melibatkan diri pada forum-forum informal, seperti jagongan, yang kemudian memasukkan isu-isu yang menguntungkan. Pertemuan warga melibatkan para pemilih tingkat RT, dengan tujuan mengenalkan calon, dan mengenalkan gapit kepada pemilih. Gapit membagikan materi kepada pemilih

berdasar data pemilih yang dilaporkan oleh gapit, dengan mendatangi rumah pemilih. Pembagian bisa dilaksanakan satu hari sebelumnya, atau pagi hari pemungutan suara. Peran sebagai aktor mobilisasi pemilih diakhiri dengan memastikan bahwa pemilih di wilayahnya telah memilih. Gapit melakukan pemantauan di wilayahnya, membuka komunikasi dengan pemilih yang belum memilih, memberikan informasi yang diperlukan, dan menyediakan transportasi menuju tempat pemungutan suara.

Merujuk pada bagaimana jaringan terbentuk, bagaimana bentuk jaringan, dan bagaimana cara kerja, maka makna makelar suara secara luas tercermin pada gapit. Secara literatur, makelar suara ditopang oleh jaringan sosial yang sudah mapan (Hellmann, 2014; Finan dan Schechter, 2012). Calon memanfaatkan jaringan tersebut menjadi jaringan mobilisasi suara. Kondisi tersebut juga ditemukan pada proses pembentukan gapit, yang berdasar pada jaringan sosial persaudaraan, kerja, pertemanan, dan lain sebagainya. Mayoritas ilmuwan politik cenderung menitik-beratkan peran makelar suara pada distribusi materi kepada pemilih. Hal tersebut tidak keliru, pada kenyataannya gapit juga melakukan peran tersebut. Namun, beberapa literatur juga menyinggung peran lain makelar suara, yakni memetakan pemilih (Larreguy, 2016), menguatkan nilai balas budi (Finan dan Schechter, 2012), dan memastikan kedatangan pemilih (Blaydes, 2006). Peran-peran tersebut juga ditemukan pada gapit di

Pilkades Desa Mranggen 2016. Artinya, gapit memiliki seluruh karakteristik makelar suara, seperti memetakan pemilih dan memastikan kedatangan pemilih. Namun gapit juga melakukan peran lain, seperti menjadi rujukan, membangun isu, dan mempertemukan calon dengan warga dalam pertemuan warga.

Daftar Pustaka

- Aspinall, E. (2014). When Brokers Betray: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 46 (4), 545-570.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014 [Money Politics in Indonesia: Patronage and Clientelism in the 2014 Legislative Election]*. Research Centre for Politics and Government.
- Blaydes, L. (2006, August). Who votes in authoritarian elections and why? Determinants of voter turnout in contemporary Egypt. In *Annual Meeting of the American Political Science Association*. Philadelphia, PA, August.
- Finan, F., & Schechter, L. (2012). Vote-buying and reciprocity. *Econometrica*, 80 (2), 863-881.
- Fisher, J., Fieldhouse, E., & Cutts, D. (2014). Members are not the only fruit: Volunteer activity in British political

- parties at the 2010 general election. *The British Journal of Politics and International Relations*, 16 (1), 75-95.
- Halili, O. Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa.
- Hellmann, O. (2014). Electoral Reform in Asia: Institutional Engineering against 'Money Politics'. *Japanese Journal of Political Science*, 15(2), 275.
- Larreguy, H., Marshall, J., & QUERUBin, P. A. B. L. O. (2016). Parties, brokers, and voter mobilization: How turnout buying depends upon the party's capacity to monitor brokers. *American Political Science Review*, 110(01), 160-179.
- Mattlin, M. (2004). Nested pyramid structures: Political parties in Taiwanese elections. *The China Quarterly*, 180, 1031-1049.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Dua Ratus Tahun Demokrasi Desa: Potret Kegagalan Adopsi Nilai Demokrasi Oleh Bangsa Indonesia*, Proceeding Semnas FISIP-UT 2011. pp. 552-572.
- Padmasukaca. (1967). *Sarine Basa Jawa*. diakses secara online di www.sastra.org/bahasadanbudaya/38-kamus-dan-leksikon/916-sarine-basa-jawapadmasukaca-1967-139-hlm-001-046.
- Padmasusastra. (1967). *Bausastra: Jarwa Kawi*. diakses secara online di www.sastra.org/bahasadanbudaya/38-kamus-dan-leksikon/200bausastra-jarwa-kawi-padmasusastra-1903-11bagian-3-pa-nga.
- Padmasusastra. (1967). *Tatatjara*. Diakses secara online di www.sastra.org/bahasa-dan-budaya-/62-adat-dan-tradisi/924-tatacarapadmasusastra-2602-60-hlm-060-119.
- Poerwadarminta. (1939). *Bausastra Jawa*. diakses secara online di www.sastra.org/bahasa-dan-budaya/38-kamus-dan-leksikon/789-bausastra-jawa-poerwadarminta-1939-75-bagian-09-g.
- Tawakkal, George T. I. (2009). *Peran Partai Politik Dalam Mobilisasi Pemilih Studi Kegagalan Parpol Pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Demak 2009*. Tesis S2 tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro)
- Winter. (1928). *Tembung Kawi Mawi Tegesipun*, diakses secara online di www.sastra.org/bahasa-dan-budaya/38-kamus-dan-leksikon/310-tembung-kawi-mawitegesipun-winter-1928-1506-bagian-4-ma-nga